

Inter-State Cooperation in Enforcement of International Criminal Law Against Financial Crimes in the Banking Sector

Aep Hendar Cahyad^{1*}, Edi Santoso²

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Aep Hendar Cahyad aephendar9673@gmail.com

ARTICLE INFO

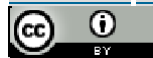
Keywords: Inter-State Cooperation, International Criminal Law Enforcement, Financial Crimes, Banking Sector

Received : 5 April

Revised : 23 May

Accepted: 17 June

©2024 Cahyad, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research investigates cooperation between countries in enforcing international criminal law against financial crimes in the banking sector. Through a qualitative approach, this research analyzes the mechanisms for identifying, implementing and evaluating cooperation between countries and the factors that influence its effectiveness. The findings highlight the important role of legal harmonization, effective communication, and increasing the capacity of law enforcement agencies in enhancing international cooperation in addressing financial crime in the banking sector. Proposed suggestions include the establishment of stronger agreements, cross-border training, and increased transparency in cooperation processes

Kerja Sama Antar-Negara dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Keuangan di Sektor Perbankan

Aep Hendar Cahyad^{1*}, Edi Santoso²

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Aep Hendar Cahyad aephendar9673@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kerja Sama Antarnegara, Penegakan Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Keuangan, Sektor Perbankan

Received : 5 April

Revised : 23 May

Accepted: 17 June

©2024 Cahyad, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis mekanisme identifikasi, implementasi, dan evaluasi kerja sama antarnegara serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Temuan menyoroti peran penting harmonisasi hukum, komunikasi yang efektif, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam meningkatkan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan keuangan di sektor perbankan. Saran yang diusulkan mencakup pembentukan perjanjian yang lebih kuat, pelatihan lintas batas, dan peningkatan transparansi dalam proses kerja sama

PENDAHULUAN

Kerja sama antar-negara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perdagangan lintas batas, kejahatan keuangan di sektor perbankan telah menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan respons yang terkoordinasi dari berbagai negara. Latar belakang ini menyoroti perlunya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi berbagai jenis kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, pemalsuan, dan penipuan dalam sektor perbankan.

Pertama-tama, sektor perbankan menjadi sasaran utama bagi pelaku kejahatan keuangan karena adanya akses terhadap dana yang besar dan infrastruktur keuangan yang kompleks. Perbankan yang terkoneksi secara global memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi lintas batas dengan lebih mudah, menyulitkan identifikasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi krusial dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelaku kejahatan keuangan di sektor perbankan.

Kedua, perkembangan teknologi telah memperluas cakupan kejahatan keuangan dengan munculnya kejahatan cyber yang menasar sistem perbankan. Serangan perbankan digital, pencurian data, dan penipuan online merupakan contoh kejahatan keuangan modern yang memerlukan kerja sama lintas negara dalam pengumpulan bukti dan penegakan hukum. Tanpa kolaborasi yang efektif, negara-negara sulit menangani ancaman keamanan yang berkembang di ranah digital.

Ketiga, perbedaan dalam regulasi dan hukum antarnegara seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah ini dengan melakukan transaksi di yurisdiksi yang longgar atau menggunakan peraturan yang berbeda antara negara untuk menghindari penuntutan. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dan perjanjian bilateral serta multilateral menjadi penting untuk memperkuat kerja sama antar-negara dalam penegakan hukum pidana internasional.

Keempat, penegakan hukum pidana internasional yang efektif terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan memerlukan pembentukan jejaring informasi dan pertukaran intelijen yang luas antar negara. Dengan berbagi informasi tentang modus operandi, pelaku, dan aset yang terlibat dalam kejahatan keuangan, negara-negara dapat lebih efektif dalam menyelidiki dan menindak para pelaku kejahatan lintas batas. Namun, perlu diperhatikan juga keamanan dan privasi dalam pertukaran informasi tersebut agar tidak disalahgunakan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Negara

Kerjasama antar-negara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi hingga koordinasi operasional. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan lintas batas dengan efektif. Hal ini melibatkan pertukaran data dan intelijen keuangan, koordinasi dalam penyelidikan dan penuntutan, serta adopsi peraturan yang seragam untuk mengisi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tanpa kerjasama yang kuat antar-negara, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan akan terbatas dan kurang efektif.

B. Penegakan Hukum Pidana Internasional

Penegakan hukum pidana internasional bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan lintas batas yang melanggar hukum di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks kejahatan keuangan di sektor perbankan, penegakan hukum pidana internasional melibatkan kerjasama antarnegara dalam penyelidikan, penuntutan, dan ekstradisi pelaku kejahatan. Negara-negara bekerja sama untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan keuangan yang melarikan diri ke negara lain, serta mengkoordinasikan upaya untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Hal ini membutuhkan adanya perjanjian ekstradisi, kerjasama polisi, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum di berbagai negara.

C. Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan di sektor perbankan mencakup berbagai aktivitas ilegal yang melibatkan penggelapan, penipuan, atau manipulasi dalam sistem keuangan, terutama di sektor perbankan. Contoh kejahatan keuangan meliputi pencucian uang, penipuan kredit, manipulasi pasar, dan korupsi dalam institusi keuangan. Pelaku kejahatan keuangan seringkali menggunakan teknik yang kompleks dan lintas batas, seperti pencucian uang melalui transfer lintas negara atau penipuan melalui platform perbankan digital. Kejahatan keuangan memiliki dampak yang serius tidak hanya pada stabilitas sektor keuangan, tetapi juga pada ekonomi global secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan keuangan memerlukan kerjasama antarnegara dan koordinasi yang baik dalam menghadapi tantangan ini.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, dokumen resmi pemerintah, studi kasus, dan literatur ilmiah terkait. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerjasama antarnegara dalam menangani kejahatan keuangan di sektor perbankan. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam

kerja sama internasional ini, termasuk lembaga penegak hukum, regulator, dan pihak swasta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang upaya-upaya kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Kerja Sama Antarnegara dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Keuangan di Sektor Perbankan

Kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi hingga evaluasi. Pertama, tahap identifikasi melibatkan pengenalan masalah kejahatan keuangan di sektor perbankan yang melintasi batas negara. Negara-negara biasanya mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan kerja sama internasional melalui pertukaran informasi, laporan intelijen keuangan, atau koordinasi antarlembaga penegak hukum. Selanjutnya, tahap implementasi melibatkan pembentukan mekanisme resmi atau informal untuk menjalankan kerja sama antarnegara. Hal ini bisa berupa penandatanganan perjanjian bilateral atau multilateral, pembentukan tim investigasi bersama, atau kerjasama langsung antarlembaga penegak hukum.

Selama tahap implementasi, berbagai negara membangun jaringan komunikasi dan pertukaran informasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ini termasuk pertukaran data tentang pelaku kejahatan, transaksi keuangan yang mencurigakan, dan aset yang terkait dengan kejahatan keuangan. Negara-negara juga mungkin melakukan pelatihan bersama atau workshop untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum mereka dalam menghadapi kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Namun, implementasi kerja sama antarnegara juga dapat dihambat oleh perbedaan hukum, budaya, dan bahasa antar negara.

Tahap evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan berjalan efektif. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja mekanisme kerja sama yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Evaluasi ini dapat melibatkan pengumpulan umpan balik dari lembaga penegak hukum, analisis data tentang keberhasilan operasi bersama, serta pertemuan antarnegara untuk membahas masalah-masalah yang muncul selama implementasi. Dengan demikian, tahap evaluasi memainkan peran krusial dalam mengarahkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari mekanisme kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja sama Antarnegara dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Keuangan di Sektor Perbankan

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan dapat sangat bervariasi, mulai dari perbedaan hukum dan regulasi, hingga masalah kepercayaan dan politik. Pertama, perbedaan hukum dan regulasi antarnegara dapat menjadi hambatan utama. Ketika negara-negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, termasuk prosedur ekstradisi dan penggunaan bukti yang berbeda, ini dapat menyulitkan proses penegakan hukum lintas batas. Selain itu, perbedaan dalam budaya dan bahasa juga dapat mempersulit komunikasi dan pemahaman antarlembaga penegak hukum dari berbagai negara.

Kedua, masalah politik dan kepercayaan antarnegara juga dapat memengaruhi efektivitas kerja sama. Misalnya, ketegangan politik antara dua negara dapat menghambat kerja sama penegakan hukum, bahkan jika ada kepentingan bersama dalam menangani kejahatan keuangan. Selain itu, ada juga masalah kepercayaan antara lembaga penegak hukum dari negara yang berbeda, yang dapat menghambat pertukaran informasi yang efektif atau kerja sama dalam penyelidikan bersama.

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penting untuk memperkuat kerjasama polisi dan lembaga penegak hukum melalui pertukaran informasi yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Ini dapat mencakup pembentukan platform atau jaringan komunikasi khusus yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk berbagi intelijen dengan cepat dan aman.

Kedua, harmonisasi hukum dan regulasi antarnegara juga diperlukan untuk mengatasi perbedaan yang ada. Ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang memfasilitasi ekstradisi, pertukaran bukti, dan kerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bersama antarlembaga penegak hukum dari berbagai negara juga dapat meningkatkan pemahaman bersama tentang masalah kejahatan keuangan dan cara penanganannya. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan adalah suatu kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas dan lintas batasnya kegiatan kejahatan keuangan. Dalam mengidentifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi mekanisme kerja sama tersebut, terungkap bahwa faktor-faktor seperti perbedaan hukum, budaya, politik, dan kepercayaan antarnegara memengaruhi efektivitasnya. Meskipun demikian, langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat diambil, termasuk harmonisasi hukum dan regulasi,

peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi, serta peningkatan pemahaman bersama melalui pendidikan dan pelatihan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk terus mendorong pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral yang memfasilitasi kerja sama hukum internasional, termasuk ekstradisi, pertukaran informasi, dan koordinasi penyelidikan. Selanjutnya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan keuangan yang semakin kompleks, melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja sama perlu ditingkatkan, dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi standar etika dan keamanan yang tinggi. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan dapat menjadi lebih efektif dalam menangani ancaman yang semakin kompleks di era globalisasi ini.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dalam kerangka kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan dapat mengeksplorasi beberapa aspek yang masih belum terjamah secara mendalam. Salah satunya adalah analisis dampak dan efektivitas dari perjanjian kerja sama yang telah ada, serta identifikasi hambatan-hambatan yang masih terjadi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan untuk mempertimbangkan peran aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam mendukung kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar, untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Gunawan, Y. (2012). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112-128.
- Puspitasari, D. R. (2022, August). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*.
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113-126.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27.